



**BAGIAN PKORB
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI**

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

TRIWULAN 2

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, ridho dan hidayah-Nya kami masih diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI sekaligus penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan 2 Tahun 2024 dengan lancar dan sukses. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan RB dari Triwulan 2 Tahun 2024, termasuk capaian program dan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menjadi bahan acuan dan *feed back* untuk mendukung pelaksanaan evaluasi internal dan evaluasi eksternal, serta penyusunan rencana kerja pelaksanaan RB di tahap berikutnya.

Kepada Tim RB Tahun 2024, kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan RB Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan 2 Tahun 2024. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RB Triwulan 2 Tahun 2024 ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun dari semua pihak.

Akhir kata, kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan RB ke depannya.

Jakarta, Juli 2024
Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Helmizar".

Drs. Helmizar, M.E.

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional, Reformasi Birokrasi (RB) menjadi ujung tombak terciptanya *World Class Bureaucracy* yang tertuang sebagai visi dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Memasuki periode terakhir dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi, pelaksanaan RB pada periode 2020-2025 diharapkan mampu melakukan percepatan sehingga visi tersebut dapat terealisasikan.

Upaya percepatan perlu dilakukan secara komprehensif sehingga *outcome* yang dihasilkan dapat lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait. Oleh karena itu, upaya percepatan perlu disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dengan begitu, upaya percepatan pelaksanaan RB dapat berdampak positif terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan RB, Sekretariat Jenderal DPR RI melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB di tingkat instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan RB didesain secara tepat, dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta berdampak positif pada hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para *stakeholder*.

Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa monitoring dan evaluasi RB merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan RB. Kegiatan yang dilaksanakan per triwulan ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan RB yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan RB di triwulan berikutnya, serta peningkatan capaian pelaksanaan kegiatan RB Sekretariat Jenderal DPR RI ke depannya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024*.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan II Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2024 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Sekretariat Jenderal DPR RI;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI guna meningkatkan hasil pencapaian RB Sekretariat Jenderal DPR RI.

LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN II TAHUN 2024
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB General berfokus pada penyelesaian isu hulu, yaitu perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis RB dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan sasaran *Road Map* RB 2020-2024. Pada tingkatan instansional/level mikro, pelaksanaan RB mencakup implementasi kebijakan maupun program RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta program inovasi RB yang diperlukan untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 yang mengatur tentang penajaman *Road Map* RB Nasional, penilaian RB kini terdiri dari pelaksanaan RB General dan RB Tematik. RB General dilakukan atas 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama. Sedangkan RB Tematik terdiri atas lima tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.

A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024				Penanggung Jawab
KemenPANRB	4	26,98	26,98				Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan kajian penyederhanaan birokrasi	Jumlah kajian penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 350.039.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penyampaian usulan penyederhanaan birokrasi	Jumlah surat usulan penyederhanaan birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penetapan struktur organisasi berdasarkan surat persetujuan penataan organisasi	Jumlah Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Pada indikator kegiatan Penyederhanaan Birokrasi, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan pada Triwulan 4. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 2.

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KemenPANRB	-	3	4		Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan evaluasi atas Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 49.800.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Sosialisasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi	-	-	-	1	Rp. 53.150.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Implementasi Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan implementasi sistem dan mekanisme kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Pada indikator kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan pada Triwulan 3. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan 2.

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

a. Indeks SPBE

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KemenPANRB	2,95	3,57	3,6		Pusat Teknologi dan Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Meningkatkan penerapan manajemen aset TIK	Laporan penerapan dan dokumentasi pengelolaan aset TIK yang fokus pada perangkat keras dan perangkat lunak	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Meningkatkan penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR)	Laporan peningkatan ruang lingkup UPR berdasarkan prioritas risiko SPBE	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Menyusun dan menerapkan pedoman pengelolaan perubahan layanan TIK	Tersusunnya kebijakan/pedoman perubahan layanan SPBE dengan fokus pada perubahan layanan TIK yang diterapkan DPR RI	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Mengukur utilitas aplikasi/sistem informasi	Hasil evaluasi utilitas pemanfaatan aplikasi/sistem informasi di DPR RI	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025-2029	RITIK dan Peta Jalan TIK Tahun 2025- 2029 yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional	1	1	1	1	Rp. 800.000.000	Telah terlaksana

Berkaitan dengan rencana aksi penerapan manajemen aset TIK, Pusat Teknologi dan Informasi bersama dengan Bagian Administrasi BMN telah melakukan Rapat Koordinasi terkait monitoring dan evaluasi aplikasi Sirangga (Sistem Informasi Barang Milik Negara)

pada tanggal 17 Mei 2024. Pada rapat ini dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sirangga perlu dilakukan perubahan nama menjadi DigitAll karena untuk pengembangan kedepannya, aplikasi ini dapat mencakup semua kegiatan pengelolaan aset (tidak hanya memuat database dari Barang Milik Negara). Kemudian pada aplikasi Sirangga ini selain adanya modul inventarisasi, perlu dilakukan penambahan modul penghapusan, modul sewa, dan juga modul perencanaan Barang Milik Negara. Selain itu dilakukan juga pembahasan terkait evaluasi pengelolaan aset TI serta evaluasi SPBE Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Data dari aplikasi SAKTI sudah terintegrasi dengan DigitAll. Terkait pengelolaan aset TI, perlu dibuat akun *user* untuk Pustekinfo pada aplikasi DigitAll.



Gambar 1.1. Rapat Koordinasi terkait *Beta Testing* Modul Perencanaan Serta Evaluasi Pengelolaan Aset TI

Kemudian untuk rencana aksi penerapan manajemen risiko SPBE terhadap unit kerja (UPR), telah dilakukan Rapat Koordinasi bersama penyedia jasa pada tanggal 18 April 2024 terkait finalisasi draft kuesioner manajemen risiko ke 11 (sebelas) unit Eselon II. Kuesioner ini telah disebar pada tanggal 23-24 April 2024 kepada para responden. Kemudian di tanggal 26 April 2024 telah dilakukan pemaparan hasil pengisian kuesioner terkait manajemen risiko serta perlu adanya konfirmasi lanjutan pada responden.



Gambar 1.2. Rapat Finalisasi Draft Kuesioner Matriks ke 11 Unit Eselon II

Rencana aksi penyusunan dan penerapan pedoman pengelolaan perubahan TIK, telah dilaksanakan melalui kegiatan apat koordinasi untuk penyusunan SOP turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 tahun 2023 tentang Manajemen Layanan TI pada tanggal 18 April 2024. Tiga SOP yang sudah disahkan antara lain adalah SOP Permintaan Layanan TI, SOP Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi, serta SOP Pengelolaan Perubahan. Pada tanggal 26 April 2024, dilakukan sosialisasi Surat Keputusan Pedoman Pengelolaan Aplikasi yang dihadiri 12 (dua belas) unit kerja eselon II. Pada kegiatan sosialisasi tersebut, disampaikan juga terkait SOP permintaan layanan TI, SOP pembangunan dan pengembangan aplikasi, serta SOP pengelolaan perubahan.



Gambar 1.3. Rapat Koordinasi terkait Rapat SOP Pengelolaan Perubahan Layanan TIK



Gambar 1.4. Kegiatan sosialisasi SK Pedoman Pengelolaan Aplikasi

Pada rencana aksi pengukuran utilitas aplikasi/sistem informasi, telah dilakukan rapat koordinasi terkait Manajemen Layanan Teknologi Informasi (MLTI) pada 22 Mei 2024. Adapun kegiatan ini meliputi pembahasan tantangan dalam implementasi MLTI di Pustekinfo Sekretariat Jenderal DPR RI serta persiapan awal, yaitu untuk sosialisasi Peraturan

Sekretaris Jenderal MLTI ke unit lain. Sebagai bentuk evaluasi kinerja dari sistem MLTI ini, nantinya dapat dilakukan audit ISO 2000 dan juga pengukuran utilitas aplikasi. Pengukuran utilitas aplikasi membantu dalam memenuhi persyaratan kepatuhan dan tata kelola yang baik serta memastikan bahwa layanan TI memberikan nilai maksimal bagi organisasi.



Gambar 1.5. Rapat Koordinasi terkait MLTI

Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal MLTI pun telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 dengan mengundang perwakilan dari tiap unit kerja Eselon II untuk membangun awareness terkait MLTI. Sehingga ketika nanti akan dilakukan *interview* ke tiap unit untuk persiapan audit ISO 2000, para responden sudah terinfo terkait tujuan dilakukan *interview* yang berkaitan dengan manajemen layanan yang diberikan Pustekinfo ke unit lain.



Gambar 1.6. Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Manajemen Layanan Teknologi Informasi

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/AmrEN6JfpGMydLJ>

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KemenPANRB	-	1	3		Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE	Laporan evaluasi dan rekomendasi eksistensi pengaturan arah pemanfaatan Arsitektur SPBE sebagai pedoman keterpaduan/integrasi SPBE	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan reviu aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI	Laporan pembaharuan Arsitektur SPBE As-Is DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	1	1	1	1	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Arsitektur SPBE To-Be DPR RI	Laporan penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI pada aplikasi SIA SPBE V2 Kementerian PANRB	-	1	1	1	Rp. 60.000.000	Belum terlaksana
Melakukan <i>gap analysis</i> dan menyusun Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	Laporan penyusunan Peta Rencana SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE	-	1	1	1	Rp. 0	Belum terlaksana

Pada rencana aksi evaluasi kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE, telah dilakukan beberapa kegiatan dalam rangka menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK). Pada tanggal 6 Mei 2024 telah dilakukan Review Dokumen Persiapan Pengadaan dan sekaligus menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh Pokja Pemilihan untuk paket pengadaan penyedia barang/jasa Penyusunan RITIK DPR RI. Selanjutnya, pada tanggal 28 Mei 2024, telah dilakukan rapat persiapan penayangan lelang (seleksi) penyedia barang/jasa RITIK dengan ULP. Pada tanggal 31 Mei 2024, telah dilaksanakan juga Acara

Pemberian Penjelasan/Aanwijzing Kualifikasi untuk paket pekerjaan Jasa Konsultan Penyusunan RITIK dari Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI ke Pustekinfo. Pada saat kegiatan ini berakhir, terdapat 19 (sembilan belas) peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut. Kemudian di tanggal 12 Juni 2024, telah dilakukan rapat pembuktian seleksi pengadaan penyedia jasa penyusunan RITIK.



Gambar 1.7. Rapat Persiapan Penayangan Lelang (Seleksi) Penyedia Barang/Jasa RITIK dengan ULP



Gambar 1.8. Rapat pembuktian seleksi pengadaan penyedia jasa penyusunan
RITIK

Selanjutnya pada rencana aksi review aktual atas Arsitektur SPBE As-Is DPR RI, telah dilakukan rapat koordinasi dengan penyedia barang/jasa untuk pembahasan terkait scope pengisian arsitektur SPBE pada SIA SPBE pada tanggal 6 Mei 2024. Kemudian telah dilaksanakan pula rapat lanjutan terkait Arsitektur SPBE dengan penyedia barang/jasa pada tanggal 16 Mei 2024. Pada rapat ini disimpulkan bahwa pemutakhiran arsitektur SPBE As-Is di aplikasi SIA SPBE sudah bisa dimulai dan berkaitan dengan administrasi penganggaran menyesuaikan dengan hasil revisi anggaran ke-2. Namun, terdapat kendala teknis terkait pemutakhiran arsitektur SPBE As-Is, yaitu masih dibutuhkannya pembiasaan dan adaptasi dalam penggunaan aplikasi SIA SPBE.



Gambar 1.8. Rapat terkait Arsitektur SPBE dengan Nuvision

Pada rencana aksi penyusunan arsitektur SPBE To-Be DPR RI, telah dilaksanakan rapat terkait Arsitektur SPBE dengan penyedia barang/jasa pada tanggal 16 Mei 2024. Pada rapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggeraan arsitektur to-be SPBE perlu menunggu RITIK 2025-2027 selesai, yaitu pada bulan Oktober atau November 2024. Sama halnya, rencana aksi pelaksanaan *gap analysis* untuk melihat kesenjangan antara Arsitektur As-Is dan To-Be dapat dilaksanakan jika RITIK 2025-2027 selesai. Maka, pada dasarnya penggeraan Arsitektur SPBE DPR RI akan ditunda sampai keluarnya hasil revisi anggaran ke-2. Namun, ditargetkan semua kegiatan akan tetap dilaksanakan pada tahun ini.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZFF6n8rNCebqTwi>

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Indeks Perencanaan Pembangunan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	-	91,88	92	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan	Tersusunnya Revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Rencana Kerja DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Revisi Rencana Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI TA 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan keselarasan informasi kinerja	Penyusunan Pohon Kinerja	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Penyesuaian Perjanjian Kinerja 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi penyusunan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI disusun secara simultan dengan penyusunan revisi Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020-2024 pada Triwulan IV Tahun 2023. Pohon Kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja DPR RI dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Rencana Strategis. Dengan begitu, Pohon Kinerja pun juga telah disahkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/R9gH9YkYSyJGDpn>

5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	67,28	67,46	76	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Perencanaan Kinerja	Tersusunnya Cascading dan Pohon Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 89 Tahun 2021	-	1	-	-	Rp. 25.875.000	Telah terlaksana
	Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023	-	1 (50%)	1 (50%)	-	Rp. 25.500.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 2025	-	-	1 (50%)	1 (50%)	Rp. 26.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
	Tersusunnya Rencana Aksi 2024 Eselon I dan II	26	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Pengukuran kinerja	Pembangunan aplikasi e-SAKIP	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	Rp. 220.360.000	Telah terlaksana
	Updating data Aplikasi SIMATA untuk pengelolaan rotasi mutasi	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
Penguatan Pelaporan Kinerja	Tersusunnya Laporan Kinerja 2023 di Tingkat Eselon I dan II yang sesuai dengan PermenPANRB No.53 Tahun 2014	26	-	-	-	Rp. 174.258.000	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Evaluasi	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Kinerja Triwulan Tahun 2024						
Optimalisasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tersusunnya Dokumen Evaluasi SAKIP Internal	-	-	5	-	Rp. 60.084.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut atas Evaluasi APIP	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
	Pemberian <i>reward</i> atas penilaian SAKIP unit kerja	-	-	1	-	Rp. 60.084.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi penyusunan Cascading/Perjenjangan Kinerja dan Pohon Kinerja Tahun 2024 merupakan tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB atas penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023. Penjenjangan Kinerja yang merupakan salah satu komponen Perencanaan Kinerja disusun berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Komponen ini mencakup penetapan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja, serta Target Pencapaian yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja di instansi pemerintah. Dengan Penjenjangan Kinerja, setiap unit kerja akan memiliki tanggung jawab yang jelas dalam mencapai hasil dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keterkaitan yang lebih kuat antara kinerja individu dengan tujuan organisasi secara keseluruhan.

Kemudian rencana aksi penyesuaian dokumen Perencanaan Kinerja 2024 berdasarkan Laporan Kinerja 2023 pada dasarnya merupakan bentuk tindak lanjut lainnya atas rekomendasi Kementerian PANRB atas penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023. Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, telah disusun draft perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian kembali terhadap Target 2024 yang masih lebih rendah dibandingkan dengan perolehan capaian kinerja di Tahun 2023. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI terus berkomitmen dalam melakukan peningkatan kualitas kerja dan kinerja setiap tahunnya. Penyesuaian pada dokumen PK sebagai dokumen perencanaan kinerja, melibatkan pimpinan dari seluruh unit kerja dimana dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar penetapan kebijakan pada target kinerja Tahun 2024. Dalam hal ini, Bagian PKORB telah menyusun draft perubahan PK pada Triwulan II untuk kemudian menunggu pengesahan dari seluruh pimpinan unit kerja baik Eselon I dan Eselon II, sehingga diharapkan perubahan dokumen PK 2024 dapat disahkan di awal Triwulan III 2024.

Selanjutnya pada rencana aksi pembangunan aplikasi SAKIP di Triwulan II, telah dilakukan pengembangan pada komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pada komponen pengukuran kinerja, kegiatan yang akan diukur didasarkan pada rencana aksi yang telah dikirim oleh seluruh unit kerja baik di tingkat Eselon I maupun Eselon II. Dari data indikator rencana aksi tersebut, akan dilakukan pengukuran terhadap capaian kinerja setiap triwulannya.

Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Triwulan II dilaksanakan dalam rangka pemenuhan rekomendasi Kementerian PANRB atas penilaian SAKIP Sekretariat Jenderal DPR RI. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perbaikan proses pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja untuk kemudian dilakukan analisis pencapaian kinerja. Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian PKORB telah mengirimkan surat kepada seluruh unit kerja Eselon II untuk menyusun laporan atas capaian Rencana Aksi kegiatan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II. Laporan tersebut diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan dalam menyusun strategi atau kebijakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada rencana aksi *updating* aplikasi SIMATA, Bagian PPK ASN Biro SDMA dan Pusat Teknologi Informasi terus melakukan pembaharuan data secara berkala di aplikasi SIMATA. Begitu pula dengan rencana aksi penyusunan tindak lanjut atas Evaluasi APIP yang telah terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/mgcYRn3BLWNnSwb>

6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024				Penanggung Jawab
KemenPANRB	4 unit	5 unit	6 unit				Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	SK pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 2.904.000	Telah terlaksana
Pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama	Laporan Pendampingan ZI	4	4	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit ZI	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI							
Melaksanakan survey penilaian persepsi korupsi dan survey penilaian kualitas pelayanan	Laporan survey	-	5	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Evaluasi unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WBK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WBK/WBBM sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021	Dokumen persyaratan pengajuan unit ZI	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat pengajuan unit kerja menuju WBK	-	1	-	-	Rp. 17.424.000	Telah terlaksana
Proses evaluasi oleh TPN	Surat undangan wawancara	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Surat Permintaan validasi survei ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Verifikasi lapangan unit ZI	-	-	1	-	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Lembar Hasil Evaluasi (LHE) KemenPANRB	-	-	-	1	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi pendampingan pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama di Triwulan II telah dilaksanakan kepada 4 (empat) unit kerja, yaitu:

1. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
2. Biro Keuangan;
3. Pusat Teknologi dan Informasi;
4. Biro Perencanaan dan Organisasi.

Kemudian untuk rencana aksi pembangunan dan penilaian mandiri Lembar Kerja Evaluasi (LKE) masih dalam proses penyelesaian mengingat terdapat perubahan *deadline* pengusulan unit kerja ZI kepada Kementerian PANRB menjadi pada tanggal 18-31 Juli 2024. Sehingga, waktu yang ada akan digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan dan penilaian mandiri guna memperoleh predikat WBK sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, rencana aksi pelaksanaan Survey Penilaian Persepsi Korupsi dan Survey Penilaian Kualitas Pelayanan telah dilaksanakan kepada seluruh unit kerja ZI yang akan diusulkan pada tahun 2024.

Untuk rencana aksi evaluasi unit kerja ZI sesuai PermenPANRB No. 90 Tahun 2021, hasilnya akan dikirimkan pada Juli 2024 dikarenakan perubahan *deadline* pengusulan unit kerja ZI kepada Kementerian PANRB menjadi 18-31 Juli 2024. Sedangkan untuk rencana aksi evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN) akan dilaksanakan pada minggu ke-4 Juni 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/zIKaXfpd2NXkQzC>

7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
BPKP	Level 3 (3,185)	Level 3 (3,270)	Level 3 (3,28)		Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	SK Tim Penilaian Mandiri (PM) dan SK Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/bimtek/ sosialisasi SPIP	-	2	-	-	Rp. 110.119.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya	Dokumen Indikator dan Target Kinerja PK yang telah direvisi	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Belum terlaksana
Pembuatan <i>cascading</i> kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> dan <i>critical success factor</i>	Dokumen <i>cascading</i> kinerja	-	1	-	-	Rp. 5.808.000	Telah terlaksana
Melakukan analisis risiko terkait dengan risiko korupsi pada kegiatan utama yang menghasilkan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian yang terjadwal	<i>Risk Register</i> dan Laporan penyusunan peta risiko korupsi dan rencana tindak pengendalian	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Analisis risiko digunakan sebagai dasar bahan penyusunan rencana tindak pengendalian dan secara berkala mendokumentasikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian dengan baik	Laporan Monitoring Penanganan Risiko	-	-	1	-	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Melakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem antikorupsi yang sudah ada (FCP)	Laporan atas monitoring dan evaluasi atas pedoman, peta proses bisnis dan SOP	-	-	-	1	Rp. 5.808.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Memantau dan mengoptimalkan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan	Laporan atas pemantauan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK	-	1	1	1	Rp. 103.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan							

Pelaksanaan rencana aksi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1100/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024.

Kemudian pada rencana aksi pembuatan *cascading* kinerja berdasarkan *logical framework* dan *critical success factor*, telah dilakukan penyusunan kinerja Eselon I dan II Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Sedangkan untuk rencana aksi pemantauan dan optimalisasi tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK untuk meminimalkan terjadinya temuan berulang, temuan terkait pengelolaan BMN, dan temuan terkait ketaatan, telah dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Laporan Pemantauan TLHP BPK RI Semester II Tahun Anggaran 2023.

Namun, untuk rencana aksi penyesuaian dokumen Perencanaan Kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan belum terlaksana. Dalam hal ini, akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan Bagian PKORB dan akan ditindaklanjuti di Triwulan III.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LAtD3aXzJojZDcn>

8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	100%	2	4	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembangunan aplikasi/dashboard pengaduan berbasis AI	Aplikasi/dashboard pengaduan berbasis AI	-	-	-	1	Menggunakan anggaran Pusat	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
						Teknologi dan Informasi	dilaksanakan pada Triwulan 4
Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI	Unggahan konten media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI ke sosial media Biro Hukum Pengaduan Masyarakat	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan video testimoni pengaduan masyarakat oleh anggota DPR RI	Video testimoni pengaduan masyarakat oleh Anggota DPR RI	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan terintegrasinya Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	2	-	-	-	Rp. 206.400.000	Telah terlaksana
Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	Terlaksananya koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat	1	1	-	-	Rp. 120.000.000	Telah terlaksana
FGD optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai dukungan peningkatan kualitas tugas dan fungsi pengawasan DPR RI	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	1	-	1	-	Rp. 6.800.000	Telah terlaksana
Bimtek pengelolaan pengaduan masyarakat	Tercapainya SDM yang kompeten dalam mengelola pengaduan masyarakat	-	-	-	1	Anggaran Pusbangkom	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi publikasi media sosial dan koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat telah dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/dt95rQiSzIZKR6>

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KemenPANRB	77,43	59,7	78,9		Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan sosialisasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Edaran terkait kewajiban PPK dalam menyusun kertas kerja rencana umum pengadaan dan menginput Pengadaan Barang/Jasa pada aplikasi SIRUP	Dokumen rekapitulasi minimal 70% dari total nilai pengadaan telah diinput dalam Aplikasi SIRUP	1	-	-	-	Rp. 30.000.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait e-purchasing dan tata cara perhitungan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Percentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 349.332.000	Telah terlaksana
Melaksanakan sosialisasi probity audit	Percentase peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melaksanakan bimbingan teknis	Percentase peserta yang hadir dalam	-	-	-	1	Rp. 103.426.746	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
kepada PPK dengan mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait penginputan data Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Aplikasi SIRUP	bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan						dilaksanakan pada Triwulan 4
Melaksanakan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, kewajiban membuat pakta integritas, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI	Percentase vendor/penyedia yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 91.368.000	Belum terlaksana
Menyusun rencana aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023	Rencana Aksi terkait evaluasi Sistem Merit yang telah disusun dan diformalkan oleh Kepala Biro SDMA	-	1	-	-	Rp. 333.159.040	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dari hasil evaluasi Sistem Merit	Minimal 50% dari total rekomendasi telah ditindaklanjuti berdasarkan hasil evaluasi Sistem Merit	-	1	-	-	Rp. 6.900.000	Belum terlaksana
Melakukan sosialisasi terhadap Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI	Percentase Peserta yang hadir dalam sosialisasi berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 320.452.950	Telah terlaksana
Melaksanakan workshop tentang disiplin pegawai	Percentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari	1	-	-	-	Rp. 186.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	70% dari total jumlah undangan						
Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2021	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.238.500	Telah terlaksana
Menandatangani Pakta Integritas oleh calon pimpinan/pejabat di instansi	Minimal 50% dari total calon pimpinan/pejabat instansi telah menandatangani Pakta Integritas sebelum memangku jabatannya	-	-	-	1	Rp. 38.955.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Melaksanakan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	-	1	-	-	Rp. 39.238.500	Telah terlaksana
Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi	Minimal 50% dari kasus suap/gratifikasi telah dievaluasi dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Utama	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Mengikusertakan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam pelatihan e-Learning KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	Minimal 50% dari total tim UPG telah mengikuti e-Learning KPK terkait Antikorupsi dan Integritas	-	-	-	1	Rp. 2.904.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan	Minimal 50% dari total jumlah tim telah menyusun laporan kegiatan	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Belum terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan							
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti <i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	Minimal 50% dari setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas telah memberikan bukti <i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	-	1	-	-	Rp. 200.000.000	Penyesuaian Rencana Aksi
Menyusun dan melakukan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti <i>timestamp</i> keterangan <i>geolocation</i> dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas	Tersusunnya Laporan PIPK terkait pengendalian tambahan terhadap transport lokal serta menilai efektivitas pengendalian yang sudah ada	-	-	1	-	Rp. 200.000.000	Penyesuaian Rencana Aksi
Melaksanakan sosialisasi terkait perjalanan dinas kepada Tenaga Ahli	Persentase peserta yang hadir dalam sosialisasi dan bimbingan teknis berjumlah lebih dari 70% dari total jumlah undangan	1	-	-	-	Rp. 251.785.000	Telah terlaksana
Melaksanakan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	Tersusunnya laporan monitoring pengendalian intern atas proses bisnis dan pelaporan anggaran	-	-	1	-	Rp. 300.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi pelaksanaan sosialisasi *prouity audit* telah dilaksanakan pada 30 Mei 2024 dengan persentase kehadiran 99,50, yaitu total kehadiran 402 peserta dari total 404 undangan. Telah terlaksana pula penyusunan rencana aksi dari hasil evaluasi Sistem Merit di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2023.

Kemudian pada rencana aksi pelaksanaan sosialisasi terhadap Manajemen Talenta di Sekretariat Jenderal DPR RI telah terlaksana dalam bentuk workshop Manajemen Talenta pada 20 Februari 2024 dengan persentase kehadiran 90,57%, yaitu total kehadiran 48 peserta dari total 53 undangan. Telah terlaksana pula rencana aksi pelaksanaan sosialisasi penanganan benturan kepentingan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2021 pada tanggal 30 Mei 2024 dengan persentase kehadiran 99,50%, yaitu total kehadiran 402 peserta dari total 404 undangan.

Selanjutnya, rencana aksi pelaksanaan sosialisasi pencegahan terkait kebijakan, regulasi, dan mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi, pengaduan dan perlindungan terhadap pelapor telah dilaksanakan pada tanggal 3 April 2024 dengan persentase kehadiran 81,30%, yaitu total kehadiran 100 peserta dari total 123 undangan.

Pada rencana aksi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait pemberian bukti *timestamp* keterangan *geolocation* dalam hal intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan perjalanan dinas, telah dilaksanakan penyesuaian Rencana Aksi menjadi pertanggungjawaban secara *at-cost* melalui penerbitan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 11/SE-SEKJEN/2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Transportasi dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 2522/SEKJEN/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Wilayah DKI Jakarta oleh Tenaga Ahli Anggota Daerah Pemilihan DKI Jakarta.

Namun, masih terdapat beberapa rencana aksi Triwulan II dalam indikator Survei Penilaian Integritas yang belum dapat terlaksana. Rencana aksi pelaksanaan pembinaan kepada vendor/penyedia terkait pengenalan e-katalog sektoral, kewajiban membuat fakta integritas, serta informasi lain terkait pengadaan di Sekretariat Jenderal DPR RI belum terlaksana disebabkan oleh pelaksanaan revisi anggaran oleh Biro Umum untuk honor narasumber dan jamuan rapat karena anggaran tersebut terpotong untuk optimalisasi anggaran untuk tunjangan kinerja. Untuk itu, kegiatan akan dilaksanakan setelah kegiatan revisi anggaran selesai dilaksanakan. Rencana aksi ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

Sedangkan rencana aksi pelaksanaan monitoring terkait tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas hasil evaluasi Sistem Merit belum dapat dilaksanakan karena masih diperlukannya koordinasi lebih lanjut. Tindak lanjut direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan III.

Begini pula dengan rencana aksi penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait kewajiban dalam penyusunan laporan kegiatan tim untuk intensifikasi penegakan aturan mengenai penyalahgunaan honor kegiatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan saat ini Biro Keuangan sedang mengutamakan kegiatan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA). Rencana aksi ini akan dilaksanakan pada Triwulan III.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/KWmRRYto5RGwnsF>

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	-	98,80	99	Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Variabel I: Membuat surat ke Kemenkumham mengenai indikator penilaian	Surat pernyataan mengenai indikator penilaian dan daftar RUU yang telah dilakukan harmonisasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Variabel II: 1. TOR terkait pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Telah terlaksana
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
2. Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi (FGD/Workshop/Seminar)	-	1	1	1	Rp. 132.120.000	Telah terlaksana
		1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Variabel III: 1. Penyusunan SK dan Surat Tugas kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan	1. SK pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	putusan Mahkamah Konstitusi						
	2. Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Penyusunan laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	1. Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	2. Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	7	7	7	2	Rp. 349.412.000	Telah terlaksana
3. Pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
pelaksanaan Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang						
4. Penyusunan dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Variabel IV: 1. Pengumpulan Data Dukung Kebijakan pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
2. Pelaksanaan Pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking, Konsinyering</i>)	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	-	1	-	-	Rp. 48.758.000	Telah terlaksana
3. Pelaksanaan Pelaporan Pengembangan JDIH melalui e-Report	Screenshot bukti pengisian e-Report	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
4. Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI						
5. Mengumpulkan Capture Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	Screenshot Dashboard Portal JDIH	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
6. Menunggah aktifitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	Screenshot bukti upload di media sosial	-	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
7. Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah diunggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Selama Triwulan II Tahun 2024, Pusat Perancangan Undang-Undang selaku penanggungjawab IRH telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Badan Legislasi telah melakukan harmonisasi sejumlah Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh Alat Kelengkapan Dewan;
- Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan tanggal 2 Mei 2024;
- Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra telah melaksanakan workshop terkait peningkatan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan pedoman kerja dengan tema "Workshop Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Badan Keahlian" yang diselenggarakan tanggal 31 Mei – 1 Juni 2024;

- Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan serta menyampaikan 3 (tiga) buku analisis dan evaluasi undang-undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan 4 (empat) buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang hasil kajian tersebut ke Alat Kelengkapan Dewan terkait seperti Badan Legislasi, Komisi I, Komisi III, Komisi IV, dan Komisi VI;
- Biro Hukum telah menyusun Abstrak Peraturan yang dapat dilihat dan diunggah di Website JDIH.

Bersamaan dengan itu, Tim Kerja IRH juga telah melakukan rapat koordinasi dan FGD dengan mengundang narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM yang membahas terkait pengisian LKE dan pemenuhan bukti dukung dalam aplikasi IRH.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/YCkwPD93BA7Bwo6>

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2022</i>	<i>Capaian 2023</i>	<i>Target 2024</i>				<i>Penanggung Jawab</i>
			<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>	
ANRI	77,99	98,38		98,38			Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mini DV	Terpeliharanya Arsip Mini DV	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	-	1	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mobile File (<i>Roll O Pack</i>)	Terpeliharanya Mobile File	-	-	1	-	Rp. 134.080.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	-	1	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Potong	Terpeliharanya Mesin Potong	-	-	1	-	Rp. 50.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari Penyimpanan Arsip Kaset	-	1	-	-	Rp. 90.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Tiga	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	-	-	1	1	Rp. 77.700.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4
Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)	Terselenggaranya kegiatan Workshop/Bimtek/Seminar/(FGD)	3	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Persidangan	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penataan Barang/Jasa	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi pemeliharaan CD/DVD, pemeliharaan mesin cacah, dan pemeliharaan lemari kaset telah dilaksanakan selama periode Triwulan II 2024. Selanjutnya, rencana aksi sewa ruang arsip satu dan sewa ruang arsip dua telah dilaksanakan melalui surat perjanjian yang telah seslesai dibuat dan diproses.

Kemudian untuk rencana aksi peningkatan kapasitas SDM telah dilaksanakan dalam bentuk

Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Identifikasi Daftar Arsip Vital DPR RI pada tanggal 22 Mei 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZRbybLy9GwbfTE9>

12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	-	1,51	2,6		Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyelaraskan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi	Data statistik sektor yang dinilaikan telah sesuai dengan Standar Data Statistik Nasional dan Data Induk/Kode Referensi	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	Terdokumentasinya setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data	-	2	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektor	Disahkannya prosedur pengelolaan data statistik sektor	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektor	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang statistik sektor yang diselenggarakan BPS	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR	Terlaksananya bimbingan teknis dengan Produsen Data	-	1	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	dalam penggunaan Portal Satu Data DPR						
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Setiap kegiatan statistik sektoral yang dinilaiakan telah dilaporkan ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi	1	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada rencana aksi penyeleraaan data dengan Standar Data Statistik dan Data Induk/Kode Referensi, telah dilakukan penerapan Data Induk/Kode Referensi pada database Pengaduan Masyarakat dan Daftar Anggota DPR RI yaitu penggunaan Kode Wilayah Provinsi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia. Penerapan Standar Data Statistik telah dilakukan untuk menyelaraskan model penyajian data yang digunakan sehingga dapat dengan mudah dibagi pakai. Penerapan Standar Data Statistik selanjutnya tertuang pada Buku Arsitektur Data Sekretariat Jenderal DPR RI yang didalamnya menggunakan konsep variabel data sesuai dengan Standar Data Statistik yang telah ditetapkan oleh BPS.

Kemudian untuk rencana aksi pelaksanaan dokumentasi setiap tahapan pengelolaan data meliputi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data, Telah dilakukan Rapat Koordinasi dengan Tim Penilai Internal EPSS DPR RI pada tanggal 21 Februari 2024. Dalam pembahasan rapat tersebut telah dilakukan identifikasi dokumen-dokumen yang dapat digunakan dalam pemenuhan dokumentasi perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Saat ini dokumentasi yang diperlukan pada setiap tahapan telah tersedia dan digunakan sebagai eviden penilaian.

Pada rencana aksi penyusunan prosedur pengelolaan data statistik sektoral, telah dibuat prosedur tata kelola Satu Data DPR yang merupakan turunan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Tahun 2022 tentang Satu Data DPR. Prosedur yang telah dibuat merepresentasikan tahapan-tahapan pelaksanaan Satu Data DPR dengan rincian sebagai berikut:

- SOP Perencanaan Satu Data DPR;
- SOP Pengumpulan, Pengelolaan, dan Desiminasi Satu Data DPR;
- SOP Pemeriksaan dan Penyebarluasan Satu Data DPR;
- SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR.

Selanjutnya, telah dilaksanakan rencana aksi pelaksanaan pelatihan terkait pengelolaan data statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 22 – 24 Februari 2024. Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI yang anggotanya telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No. 394/SEKJEN/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal EPSS Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim Penilai Internal terdiri dari beberapa unit kerja yaitu:

- Pusat Teknologi Informasi (Walidata);
- Bagian Pengaduan Masyarakat (Produsen Data);
- Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi (Produsen Data);

- Biro SDMA;
- Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;
- Biro Perencanaan.

Selain itu, telah diselenggarakan Pelatihan dan Sertifikasi *Data Protection Officer* (DPO) pada tanggal 4 – 8 Maret 2024 yang merupakan penerapan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang manajemen data, dalam hal ini sekaligus sebagai tahapan penerapan UU Perlindungan Data Pribadi.

Rencana aksi pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan Portal Satu Data DPR telah diselenggarakan pada tanggal 22 – 24 Maret 2024 yang diikuti oleh Pustekinfo sebagai Walidata dan perwakilan Produsen Data sebagai *piloting* yaitu Bagian Pengaduan Masyarakat, Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Sekretariat Badan Legislasi, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang Undang, Bagian Hubungan Masyarakat dan Pengelolaan Museum. Dalam kegiatan tersebut masing-masing perwakilan produsen data melakukan uji coba penggunaan Portal Satu Data DPR mulai dari pengajuan data prioritas sampai dengan data berhasil dipublikasi.

Rencana aksi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dengan Unit Kerja Produsen Data dan BPS pada tanggal 2 Februari 2024 terkait evaluasi pelaksanaan EPSS. Melalui Rapat Koordinasi tersebut, telah disimpulkan dua data yang akan diajukan untuk penilaian adalah Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke DPR RI Tahun 2023 dan Kompilasi Data Daftar Anggota DPR RI Tahun 2023. Dalam hal ini, telah dilakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS melalui aplikasi ROMANTIK serta telah diterbitkan rekomendasi terhadap dua kegiatan statistik yang dinilaikan.

Bersamaan dengan pelaksanaan seluruh rencana aksi Triwulan II, Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang disahkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 394/SEKJEN/2024 sedang melakukan penilaian mandiri. Penilaian mandiri telah dilakukan dan dikirim melalui aplikasi SIMBATIK BPS pada tanggal 31 Mei 2024 dan menghasilkan Nilai Indeks Pembangunan Statistik 4.28. Penilaian dokumen oleh Tim Penilai dari BPS yang kemudian dilanjutkan dengan *interview* secara *online* pun telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/c43ooTmbeXmsHLT>

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
LKPP	9,9	47,18	72	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat surat edaran kepada para PPK untuk melakukan Pemanfaatan Sistem Pengadaaan pada aplikasi SPSE	Surat Edaran Sekretaris Jenderal DPR RI No. 1484/TI.04/1/204	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan Tahun 2024 RUP	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan penginputan Tahun 2024 dan Penyelesaian Pencatatan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023 pada aplikasi SPSE 4.5 RUP	Nota Dinas, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi Penginputan RUP di Lingkungan Biro Umum	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Evaluasi Penggunaan PDN dan UMK-Kop	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Konsultasi dengan LKPP tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 6.000.000	Telah terlaksana
Evaluasi Penginputan RUP dan Persiapan Pelaksanaan Penginputan RUP TA 2024 ke Aplikasi SIRUP	Pointer, Rekapitulasi Progress RUP Satker Sekretariat Jenderal dan Satker Dewan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Konsultasi dengan LKPP tentang Pemilihan Penyedia	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi persiapan Pengumuman paket Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2024 bersama dengan Deputi Administrasi dan Deputi Persidangan serta Pejabat Tinggi Pratama	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 25.758.745	Telah terlaksana
Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan <i>Parliamentary Meeting on The Occasion Of the 10th World Water Forum</i>	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi Penginputan RUP dengan Para PPK di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Finalisasi penginputan UP Tahun 2024 tanggal 5-6 Maret 2024 dengan mengundang para PPK dan PP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI serta Deputi Bidang Administasi dan Narasumber dari LKPP	Undangan Rapat, Rekapitulasi Progress RUP dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 115.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat Klarifikasi atas Pagu Pengadaan yang harus diumumkan pada aplikasi SIRUP kepada LKPP	Surat Klarifikasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
FGD dengan para PPK dan PP dan mengundang Narasumber LKPP sehingga	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 20.000.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
terlaksananya pengadaan barang/jasa melalui Katalog Sektoral							
Pendampingan pengisian E-Kontrak, E-Purchasing, E-Tendering, dan Non E-Tendering / Non E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2023 pada bulan Januari 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Monitoring Proses Metode E-Purchasing sampai dengan tahapan selesai	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis E-Purchasing kepada Para PPK	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan Teknis Tata Cara Perhitungan PDN dan TKDN dalam Praktik Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas, Pointer dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 78.000.000	Telah terlaksana
Pendampingan untuk para PPK dan PP agar melakukan Pencatatan pada Aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode Tender dan Purchasing	Undangan FGD, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring pencatatan pada aplikasi SPSE untuk proses pengadaan yang tidak dilakukan dengan metode Tender dan Purchasing dan menginfokan para PPK dan PP untuk	Undangan, Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
menyelesaikan proses pencatatannya							
Pelaksanaan Tender dari unit-unit kerja yang didampingi oleh JF PBJ dilakukan sampai dengan proses tender selesai	Screenshot daftar paket pekerjaan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 dari web lpse.dpr.ri	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Mengingatkan kepada para PPK agar ada minimal 1 kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan metode pembelian melalui katalog Bela Negara/Toko Daring	Laporan Singkat dan Foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PP melakukan proses Tender dilanjutkan dengan penyelesaiannya pada aplikasi E-Kontrak	Laporan singkat dan Foto kegiatan	1	-	-	-	Rp. 9.500.000	Telah terlaksana
Pendampingan kepada para PPK dan PPK untuk penyelesaian E-Kontrak sampai dengan selesai	Nota Dinas	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Pencetakan Produk Elektronik Penerbitan	Nota Dinas dan SK Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Penelaahan Etalase Produk Sarana Umum YANKES	Nota Dinas dan SK Penetapan Hasil Penelaahan Produk	1	-	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana
Monitoring dan Evaluasi RUP sesuai Revisi Anggaran dan	Undangan Rapat, Laporan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Singkat, dan Foto Kegiatan						
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024	Undangan Rapat, Laporan Singkat, dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 7.000.000	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Persidangan I	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
Pendampingan Pencatatan Realisasi Anggaran Tahun 2024 atas undangan Biro Kesekretariatan Pimpinan	Undangan Rapat dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 2
FGD Tindak Lanjut Pemenuhan JF	Undangan Rapat dan Laporan Singkat	1	-	-	-	Rp. 25.000.000	Telah terlaksana
FGD strategi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 dan Pendampingan Pengisian Si-Renaksi LKPP dengan mengundang narasumber dari LKPP	Undangan, Nota Dinas dan foto Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 60.000.000	Telah terlaksana
Membuat Surat perihal usulan pengangkatan JF PPBJ melalui perpindahan dari jabatan lain	Surat Keterangan B/178/KP.05.01/02/2024 tanggal 13 Februari 2024	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa	Surat Tugas dan Sertifikat	1	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Koordinasi dalam rangka Pemenuhan JF	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 3.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
FGD dalam rangka tindak lanjut pemenuhan kebutuhan JF dan Pengelolaan SDM	Undangan, Nota Dinas dan Foto Kegiatan	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
Tindak Lanjut Rencana Aksi Pemenuhan JF	Nota Dinas	-	1	-	-	Rp. 2.090.000	Telah terlaksana
Percepatan Penerapan 17 Standard LPSE	Undangan dan Materi Bimbingan Teknis	-	1	-	-	Rp. 141.00.000	Telah terlaksana

Pelaksanaan rencana aksi Indeks Tata Kelola Pengadaan pada Triwulan II telah dilaksanakan oleh Biro Umum selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya, yaitu:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RUP sesuai revisi anggaran sekaligus melakukan pencatatan realiasi anggaran tahun 2024 pada tanggal 23-24 April 2024;
- Pelaksanaan pendampingan lanjutan ke setiap PPK Satker Sekretariat Jenderal dan PPK Satker Dewan untuk pencatatan realisasi anggaran Tahun 2024 pada tanggal 29 April-6 Juni 2024;
- Memenuhi undangan dari Biro Persidangan I pada tanggal 29-30 April 2024 untuk melakukan pencatatan sekaligus monitoring terhadap perubahan paket pekerjaan diakarenakan adanya perubahan anggaran;
- Memenuhi undangan dari Biro Kesekretariatan Pimpinan pada tanggal 13-17 Mei 2024 untuk melakukan pencatatan sekaligus monitoring terhadap perubahan paket pekerjaan diakarenakan adanya perubahan anggaran;
- Melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 25 April 2024 dalam rangka pemenuhan JF PBJ dengan mengundang Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi di Ruang Rapat Biro Umum;
- Melakukan rapat tindak lanjut pemenuhan JF PBJ serta membahas rencana strategis pemenuhan JF PBJ pada tanggal 21 Mei 2024 dengan mengundang narasumber, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Plt. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif, dan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis;
- Menyusun laporan kondisi terkini terkait perkembangan pemenuhan JF PBJ pada tanggal 3 Juni 2024 dalam rangka peningkatan ITKP guna mendapatkan arahan lebih lanjut dari Deputi Administrasi.

Link eviden <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GgGFCTBwbSjHgLk>

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
Kemenkeu	93,66	94,26	96		Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyediaan Aplikasi Monitoring IKPA	Pembangunan Aplikasi DigitAll melalui fitur IKPA dan fitur Rencana Penarikan Dana	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terbitnya Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Perjanjian Kinerja Capaian Nilai IKPA	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 52.100.000	Telah terlaksana
	Terlaksananya sosialisasi dan bimtek Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 90.792.000	Telah terlaksana
	Pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan	1	-	1	-	Rp. 297.690.000	Penyesuaian rencana aksi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA Rencana Kegiatan	2	-	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana

Beberapa rencana aksi kegiatan IKPA yang belum dapat terlaksana pada Triwulan I telah terlaksana di Triwulan II. Rencana aksi tersebut meliputi sosialisasi dan Bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll, Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll, dan pembuatan Buku Saku terkait Tata Cara Panduan Monitoring Nilai IKPA dan Rencana Kegiatan.

Rencana aksi Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Nilai IKPA pada Aplikasi DigitAll telah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2024 oleh Biro Keuangan selaku penanggungjawab dan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi dengan mengundang seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator. Sosialisasi tersebut memuat pemaparan Reformulasi IKPA sesuai dengan Instruksi Sekretaris Jenderal No. 2 Tahun 2024 tentang Rapor IKPA Mini dan Reformulasi IKPA sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian IKPA Belanja Kementerian/Lembaga.

Kemudian rencana aksi Sosialisasi dan Bimtek Monitoring Deviasi Halaman III DIPA pada aplikasi DigitAll telah terlaksana pada bulan Mei 2024 dengan mengundang seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen. Sosialisasi tersebut memuat pemaparan tata cara pengisian Rencana Penarikan Dana yang Efektif bagi unit kerja dan tata cara pemantauan Deviasi Halaman III DIPA pada Aplikasi DigitAll.

Sedangkan pada rencana aksi pemberian Penghargaan bagi Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi Per Triwulan, telah dilakukan penyesuaian rencana aksi yang semula target penyelesaiannya pada tiap Triwulan menjadi pada Triwulan I dan III. Pada Trwiulan I penghargaan diberikan kepada Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi di Semester II Tahun 2023, sedangkan pada Triwulan III, penghargaan diberikan kepada Unit Kerja dengan Capaian IKPA tertinggi di Semester I Tahun 2024. Hal ini dilakukan karena apabila pelaksanaan anggaran di Semester berjalan belum selesai, maka belum didapatkan angka final capaian IKPA tiap unit kerja yang dapat menjadi acuan bagi pemberian penghargaan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/PqezQrDnzLPc6ez>

b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,60	3,6	3,7	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	Jumlah dokumen monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP	1	1	1	1	Rp. 25.000.000	Belum terlaksana
Monitoring realisasi PNBP khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN	Jumlah dokumen monitoring capaian PNBP pengelolaan BMN	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian	Jumlah laporan monitoring tindak lanjut pengelolaan BMN	1	1	1	1	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Melakukan pengajuan usulan penghapusan secara berkala	Jumlah laporan penghapusan per semester	-	1	-	1	Rp. 10.000.000	Telah terlaksana
Melakukan monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP	Jumlah Laporan PSP Tanah dan/atau Gedung Bangunan	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi monitoring realisasi PNBP khususnya yang bersifat dari Pengelolaan BMN, monitoring setiap triwulan terhadap seluruh dokumen persetujuan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN sudah terinput kedalam Aplikasi SIMAN modul pengawasan dan pengendalian, pengajuan usulan penghapusan secara berkala, dan

monitoring terhadap sisa BMN yang belum dilakukan PSP telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan. Namun, rencana aksi monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP belum dapat terealisasi dikarenakan temuan belum diinformasikan dan pembahasan tindak lanjut baru akan dilaksanakan di bulan Juli 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/SXMxRW4LRAGA9bb>

c. Opini BPK

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	WTP		Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Sosialisasi pengisian Matriks Tabel A kepada seluruh unit kerja pemegang akun signifikan	1	-	-	-	Rp. 66.424.000	Telah terlaksana
	Sosialisasi dan Bimtek Kriteria Penetapan Akun Belanja Pemeliharaan dan Belanja Modal	1	-	-	-	Rp. 199.137.330	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Internal dan Eksternal	Rekonsiliasi Internal Aset dan Persediaan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 353.300.000	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Belanja dan Pendapatan Tiap Bulan	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
	Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Pembayaran Belanja Pegawai						

Rencana aksi rekonsiliasi internal dan eksternal yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama telah terkasana oleh Biro Keuangan selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan. Pada kegiatan rekonsiliasi internal aset dan persediaan tiap bulan dilakukan Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Administrasi BMN selama bulan Januari - Juni Tahun 2024. Rekonsiliasi dilakukan untuk membahas hasil laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK serta Laporan Keuangan pada Semester I TA 2024.

Selanjutnya kegiatan rekonsiliasi eksternal belanja dan pendapatan tiap bulan dilakukan oleh Penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan KPPN Jakarta 7 untuk periode Desember 2023 yang dilakukan pada Januari 2024. Sementara untuk Rekonsiliasi Januari dan Mei 2024 dilakukan sepanjang Semester I TA 2024. Pada kegiatan rekonsiliasi eksternal piutang atas kelebihan pembayaran belanja pegawai telah dilaksanakan bersama PT. TASPEN dengan *output* berupa Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Adm. Keuangan, PIC Penggajian, serta Perwakilan dari PT Taspen yaitu Pension Exp. Management SubDepartement Head dan Membership Database Collection SubDepartement Head. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Januari 2024 di Hotel Santika Premiere Bintaro.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/d9b8S6Fy4sDFMP9>

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024			Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	
BPK	86,75%	94,44%		95%		Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	Terlaksananya entry meeting Pemeriksaan BPK atas LK DPR TA 2024	1	-	-	-	Rp. 12.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan rekapitulasi	-	1	-	-	Rp. 56.825.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	tanggapan konsep temuan BPK						
	Tersedianya Rekapitulasi Tanggapan Konsep Temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Rencana Aksi Konsep LHP BPK	Tersedianyan Rencana Aksi Konsep LHP BPK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyusunan Rekapitulasi Tindak Lanjut 60 (enam puluh) hari LHP BPK	Terlaksananya rapat koordinasi penyusunan tindak lanjut 60 (enam puluh) hari temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 10.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersedianya Rencana Aksi 60 (enam puluh) hari	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	Rapat Koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	1	-	-	Rp. 7.087.350	Telah terlaksana
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester I 2024	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	1	-	Rp. 7.087.350	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	Rapat koordinasi dengan unit kerja yang memiliki temuan BPK	-	-	1	-	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Tersedianya Matriks Pemantauan TLHP BPK Semester II 2024	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
	Rapat Koordinasi dengan BPK RI	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Penyusunan TLHPKN Tim	Tersedianya SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Benchmarking	Tersedianya Laporan Kegiatan	1	-	-	-	Rp. 109.983.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penyusunan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK telah dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 7 Mei 2024. Inspektorat Utama mengadakan kegiatan paket meeting dengan entitas yang diperiksa terkait penyusunan tanggapan konsep temuan BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan pada DPR RI TA 2023. Pada rapat tersebut *Liaison Officer* melakukan pendampingan dalam penyusunan tanggapan konsep temuan BPK beserta pengumpulan bukti dukung. Dari kegiatan paket meeting tersebut dihasilkan rekapitulasi tanggapan konsep temuan BPK yang selanjutnya di sampaikan ke BPK berupa *softcopy* melalui link Google Drive maupun *hardcopy* ke Auditoriat Utama Keuangan Negara III Jakarta Pusat.



Gambar 1.9. Penyusunan Tanggapan Konsep Temuan

Selanjutnya, rencana aksi penyusunan rekapitulasi rencana aksi konsep LHP BPK telah terlaksana. Berdasarkan Surat Tugas BPK RI No.2/ST/V/01/2024 terkait pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada DPR RI, disebutkan BPK melakukan pemeriksaan dari tanggal 4 Januari 2024 selama 65 hari. Pada tanggal 13 Juni 2024 telah diadakan rapat *exit meeting* dengan BPK RI terkait penyerahan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 serta permintaan rencana aksi, representasi tertulis dan kuesioner penilaian pelaksanaan pemeriksaan atas Laporan Keuangan DPR RI Tahun 2023. Untuk penyusunan

rencana aksi dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang memiliki temuan dengan didampingi oleh *Liaison Officer*. Selanjutnya, Inspektorat Utama menyusun Rekapitulasi Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK yang disampaikan kepada Auditoriat Utama Keuangan Negara III Tower BPK Lantai 4, Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juni 2024.



Gambar 1.10. Rapat exit meeting dengan BPK RI

Kemudian pada rencana aksi pemantauan TLHP BPK Semester I 2024, Inspektorat Utama telah melaksanakan pemantauan pada tanggal 3 s.d 5 Juni 2024. Kegiatan pemantauan dilaksanakan melalui rapat koordinasi bersama unit kerja yang belum menyelesaikan temuan BPK dan APIP. Pemantauan TLHP BPK pada unit kerja dilaksanakan dengan tujuan pendampingan penyelesaian temuan BPK, dan meningkatkan persentase TLHP BPK di Sekretariat Jenderal DPR RI. Dari kegiatan ini, unit kerja diberi waktu pengumpulan data eviden dalam rangka penyelesaian temuan tersebut paling lambat tanggal 7 Juni 2024. Saat ini, Inspektorat Utama sedang melakukan penyusunan matriks pemantauan TLHP BPK Semester II 2024 dan selanjutnya berkoordinasi dengan BPK RI pada tanggal 30 Juni 2024 dalam rangka penyerahan eviden TLHP Semester I 2024.



Gambar 1.11. Rapat Pemantauan TLHP Semester I 2024

Berkaitan dengan perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK, Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Inspektorat Utama telah menindaklanjuti 123 (seratus dua puluh tiga) rekomendasi yang terdiri dari 100 (seratus) rekomendasi diajukan ke status 1 (selesai) dan 23 (dua puluh tiga) rekomendasi diajukan ke status 4 yaitu tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah pada pemantauan TLHP Semester II 2023. Dengan demikian, Berdasarkan laporan hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai Semester II Tahun 2023 yang diterbitkan oleh BPK RI melalui Surat Nomor 29/S/V/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan telah diterima oleh Sekretaris Jenderal DPR RI pada tanggal 15 Mei 2024, maka capaian yang diraih oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sampai saat ini adalah sebesar

94,63% yang terdiri dari 88,94% telah sesuai rekomendasi dan 5,69% tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 547 rekomendasi sebesar Rp.45.536.488.921,65 yaitu 88,94%;
- Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 33 rekomendasi sebesar Rp.3.163.074.826,93 yaitu 5,37%;
- Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 35 rekomendasi sebesar Rp.15.070.241.887,03 yaitu 5,69%.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GQNEfo6p4em2dt>

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KASN	345,5	363	363		Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Update data talenta di SiMata	Laporan update data per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pemenuhan 20 JP pelatihan bagi setiap pegawai	Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan	1	1	1	1	Rp. 10.004.738.000	Telah terlaksana
Evaluasi berkala penerapan sistem merit	Laporan penerapan sistem merit per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana aksi pemenuhan 20 (dua puluh) JP pelatihan bagi setiap pegawai telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif selaku PIC. Pada periode Triwulan II, dapat disampaikan bahwa capaian penyelenggaraan pengembangan kompetensi adalah sebagai berikut:

- Dari jumlah total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu 1.384 orang, terdapat 345 (tiga ratus empat puluh lima) PNS atau sekitar 25% yang telah memperoleh pengembangan kompetensi 20 (dua puluh) JP atau lebih;
- Sejumlah 592 (lima ratus sembilan puluh dua) PNS atau sekitar 43% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI mendapatkan pengembangan kompetensi di bawah 20 (dua puluh) JP;

- Sejumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) PNS atau sekitar 32% dari total PNS Sekretariat Jenderal DPR RI belum mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi *update* data talenta di SiMata dan evaluasi berkala penerapan sistem merit telah dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/pL9JDJLCNWcgLmm>

16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
KemenPANRB	60,7%	61,7%	75%		Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan BerAKHLAK Kuis dan Bangga Bangsa di Melayani Aplikasi SIRAJIN	Penyusunan Soal Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	1	-	-	Rp. 5.000.000	Telah terlaksana
	Pengumuman Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Rapat Koordinasi	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan nilai-nilai BerAKHLAK	Persiapan Penyelenggaraan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK						Triwulan 3
	Kegiatan Seminar Penguatan Core Value BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Sosialisasi Panduan Core Value BerAKHLAK	Sosialisasi Pedoman Panduan Core Value BerAKHLAK di Portal DPR	-	1	-	-	Rp. 15.000.000	Telah terlaksana
Pemberian Penghargaan Pemenang BerAKHLAH bagi Kuis	Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 5.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi penyusunan soal Kuis BerAKHLAK telah terlaksana dengan jumlah 30 (tiga puluh) soal yang disusun oleh Widya Iswara Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI. Selanjutnya, kegiatan Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Kuis BerAKHLAK telah terlaksana pada tanggal 29 Mei 2024.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/z6gFPMfDg6A6Lak>

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024	Penanggung Jawab
KemenPANRB	82,757	93,13	93,25	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Pedoman Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Terbentuknya Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai PermenPANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Standar Pelayanan	Tersusunnya kuesioner Reviu Standar Pelayanan	80	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya pendampingan Pengisian Kuesioner yang diawali dengan Sosialisasi pengisian	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya kegiatan pengisian survei	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Terlaksananya input data kuesioner survey	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	yang telah diisi						
	Terlaksananya pengolahan data kuesioner	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Tersusunnya Laporan Reviu Standar Pelayanan	-	1	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Pembuatan Surat Edaran/Peraturan Sekretaris Jenderal	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Pengembangan Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyelenggaraan Survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Terbentuknya Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Terlaksananya Survei Kepuasan	-	-	1	-	Rp. 155.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesekretariatan Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan						Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024	-	-	5	-	Rp.0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Optimalisasi Evaluasi dan Tindak Lanjut SKM	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Tersusunnya Laporan Rekomendasi atas Evaluasi Hasil SKM	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
	Penyampaian Laporan dan Hasil Penilaian Kinerja Survei per unit kerja kepada Biro Perencanaan dan Organisasi sebagai salah satu pengukuran	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	dalam Penilaian Kinerja						

Sepanjang Triwulan II Tahun 2024, telah dilaksanakan sejumlah rencana aksi yang telah ditetapkan dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Rencana aksi dilaksanakan oleh Pusat Analisis Keparlemen selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan. Rencana aksi tersebut meliputi terlaksananya *input* data kuesioner survey yang telah diisi, terlaksananya pengolahan data kuesioner, dan tersusunnya Laporan Review Standar Pelayanan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/R5b9NEy9FJMYEtH>

b. Indeks Pelayanan Publik

Leading Sector	Capaian 2022	Capaian 2023	Target 2024		Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	
KemenPANRB	4,31	4,40	4,51		Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	Dokumen Surat Tugas/SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2024	Hasil Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim	1	-	-	-	Rp. 1.540.000	Telah terlaksana
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP)	Tersedianya Laporan FKP	-	1	-	-	Rp. 35.375.000	Telah terlaksana
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tersedianya Laporan SKM	-	-	1	-	Rp. 52.290.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional	Tersedianya Laporan PEKPPP	-	-	1	-	Rp. 4.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pelaporan PEKPPP ke KemenPANRB	Dokumen tanda terima pelaporan PEKPPP dari KemenPANRB	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Tersedianya dokumen Rencana Tindak Lanjut	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	100%	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi Forum Konsultasi Publik (FKP) telah terlaksana oleh Bagian Layanan Kesehatan selaku Unit Lokus Evaluasi (ULE) yang ditetapkan untuk mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). FKP dilaksanakan dalam rangka Review Standar Pelayanan Rawat Jalan Klinik Utama Layanan Kesehatan Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 19 Juni 2024.



Gambar 1.12. Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Rawat Jalan Klinik Utama Layanan Kesehatan Sekretariat Jenderal DPR RI

Dalam rangka mendorong pembinaan dan pengembangan inovasi, serta meningkatkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) telah dilaksanakan kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Peserta kompetisi meliputi satuan kerja setingkat Eselon II di Sekretariat Jenderal DPR RI. Sedangkan Tim Penilai terdiri dari Penilai Internal yang merupakan pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Penilai Eksternal yang berasal dari Ombudsman RI. Pemenang dari kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024 diumumkan bertepatan dengan Rapat Kerja

Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di Balikpapan pada 5 Juli 2024. Pemenang dari kegiatan ini diantaranya: Juara I Biro Umum (Sistem Teknologi Kesehatan Terintegrasi DPR RI/SITEKAD), Juara II Biro Keuangan (Aplikasi Perjalanan Dinas/ALADIN) dan Juara III Biro SDMA (Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi/PERISAI).



Gambar 1.13. Pengumuman Pemenang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/6w8343DJ2TdTzws>

LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN II TAHUN 2024

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 setelah dilakukan penajaman dan dituangkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023. RB Tematik pada dasarnya merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintah (*debottlenecking*) yang menjadi isu strategis dan prioritas Pembangunan Nasional secara kolaboratif. Pelaksanaan RB Tematik dilakukan untuk mendorong percepatan RB yang kolaboratif dan efektif mengungkit capaian kinerja prioritas pembangunan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sasaran pelaksanaan RB Tematik dan indikatornya disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga. Namun pada dasarnya, RB Tematik dituangkan ke dalam lima tema yang mendukung tujuan Pembangunan Nasional. Dalam hal ini, DPR RI memiliki intervensi yang penting untuk lima tema RB Tematik, yaitu pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, peningkatan investasi, peningkatan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, dan peningkatan produk dalam negeri. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan sebagai sistem pendukung DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Dalam hal ini, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian berupa *scientific evidence* kepada DPR RI sehingga pengambilan keputusan yang dilakukan dapat mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional. Dukungan tersebut berupa produk-produk analisis, kajian, ataupun Naskah Akademik yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Eselon 1 (Pusat) di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Dengan adanya dukungan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Badan Keahlian DPR RI, tujuan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam lima tema RB diharapkan akan tercapai.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan II Tahun 2024.

A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam tema pengentasan kemiskinan, Sekretariat Jenderal DPR RI mengangkat isu terkait nelayan Indonesia yang menghadapi tantangan ekonomi serius, terutama di tengah ambisi pemerintah untuk menggenjot ekonomi biru. Meskipun Indonesia memiliki potensi laut yang luar biasa, kesejahteraan nelayan tradisional seringkali dikesampingkan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan di kalangan nelayan, antara lain, modal yang lemah, permainan harga jual ikan, keterbatasan daya serap industri pengelolaan ikan, dominasi armada tangkap nelayan asing, dan

keterbatasan penguasaan pengetahuan dan teknologi. Untuk itu, pemberdayaan nelayan skala kecil memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan sebagai bahan pertimbangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kelautan;
- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan baik dari aspek peraturan perundang-undangan, pengawasan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersampaikannya hasil kajian kepada Pansus Rancangan Undang-Undang (RUU) Kelautan;
- 2) Tersampaikannya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Penguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Asistensi Pansus RUU Kelautan	Jumlah dokumen	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar tentang sumber daya kelautan	Jumlah dokumen	-	2	-	-	Rp. 25.200.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian tentang pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bahan pertimbangan pembahasan RUU tentang Kelautan	Jumlah dokumen	-	1	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pendampingan dalam pembahasan Undang-Undang	Jumlah dokumen	-	-	1	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3 dan 4

Pembentukan Tim Penguanan Analisis tentang Perikanan Terukur	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	2	-	-	-	Rp. 25.200.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait kebijakan perikanan terukur	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Pembentukan Tim Penguanan Analisis tentang Permberdayaan Nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 12.600.000	SDM	Telah terlaksana
Pengumpulan data ke daerah terkait pemberdayaan nelayan	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/	-	1	-	-	Rp. 34.300.000	Lain-lain	Telah terlaksana

	Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya							
Penyusunan kajian terkait sumber daya kelautan dan pemberdayaan nelayan, baik dalam laporan akhir maupun dalam produk-produk periodik	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	-	1	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyampaian hasil kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui platform data sharing terintegrasi (cloud)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4

Rencana aksi pembentukan Tim Penguatan Analisis tentang Peremberdayaan Nelayan telah terlaksana melalui peneribtan Surat Tugas Nomor: 527/PN.03/06/2024 tanggal 6 Juni 2024. Kemudian rencana aksi diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait pemberdayaan nelayan dan pengumpulan data ke daerah terkait pemberdayaan nelayan telah dilaksanakan pada tanggal 10-13 Juni 2024 dengan mengundang Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Demak, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan, Ketua HNSI Kota Pekalongan, dan beberapa orang nelayan dari Kota Pekalongan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/24oQCdHPGRC7Rky>

2. Peningkatan Investasi

Dalam tema peningkatan investasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa salah satu *intangible asset* perekonomian yang dapat menopang perekonomian nasional kedepan adalah sektor pariwisata. Namun, sektor pariwisata Indonesia masih relatif tertinggal dengan negara sekawasan yang menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Salah satu penyebab ketertinggalan tersebut adalah rendahnya investasi sektor pariwisata. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya norma yang berkaitan dengan penguatan investasi di sektor pariwisata dalam naskah akademik dan RUU;

- 2) Tersirkulasinya hasil kajian tentang determinan rendahnya investasi di sektor pariwisata baik dari aspek peraturan perundang-undangan maupun anggaran.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

- 1) Tersususnya norma penguatan investasi di sektor pariwisata;
- 2) Tersampaikannya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah naskah Akademik dan RUU	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan naskah akademik dan RUU	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	1	1	-	Rp. 102.870.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyampaian naskah akademik dan RUU kepada Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah naskah Akademik dan RUU	-	-	-	15	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	RP. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan rendahnya investasi dan dukungan	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan	-	3	-	-	Rp. 19.350.000	SDM	Telah terlaksana

anggaran pariwisata	sektor	Tinggi							
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 100.424.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3	
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp.3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3	
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	-	15	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 4	

Rencana aksi penyusunan naskah akademik dan RUU, pemetaan determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata, diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata, dan penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan rendahnya investasi dan dukungan anggaran sektor pariwisata telah dilaksanakan oleh Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara selaku penanggungjawab sesuai dengan waktu dan target yang ditetapkan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/GjXKff6wt9X7Wjw>

3. Pengendalian Inflasi

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa inflasi di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh *Volatile Food* yang mayoritas dipenuhi dari impor (komoditas pangan dan hortikultura) akibat ketidakseimbangan produksi dan konsumsi. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian dalam proses pembahasan anggaran dan pengawasan terkait pengendalian inflasi, khususnya upaya mengatasi ketidakseimbangan produksi dan konsumsi komoditas pangan dan hortikultura. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampaikannya hasil kajian kepada 15 (lima belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4				
Pembentukan Penyusun Kajian	Tim	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pemetaan determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi		Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	1	-	-	-	Rp. 51.435.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi		Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	2	-	-	Rp. 14.400.000	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi		Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait lainnya	-	1	-	-	Rp. 150.930.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian		Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/Stakeholder terkait	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

	lainnya							
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/ <i>Stakeholder</i> terkait lainnya	-	-	15	-	Rp. 112.500.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian terkait determinan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi telah terlaksana pada tanggal 6 Mei 2024. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) ini diselenggarakan dengan mengundang *Chief Economist* PT. Bank Permata Tbk. dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bersamaan dengan itu, rencana aksi kajian terkait penyelesaian permasalahan ketidakseimbangan produksi dan konsumsi dalam rangka pengendalian inflasi telah berhasil disusun dengan judul “*Outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025*”.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ce7MCKmNdxxsbaM>

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam tema pengendalian inflasi, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa capaian predikat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada 621 Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SPBE masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah tersirkulasinya hasil kajian hambatan pelaksanaan SPBE. Indikator dari sasaran tersebut adalah tersampaikannya hasil kajian kepada 18 (delapan belas) AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Penyusun Kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana

	Tinggi							
Pengumpulan data dan informasi secara primer dan sekunder	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	1	-	-	-	Rp. 68.800.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 8.400.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Penyusunan kajian terkait hambatan pelaksanaan SPBE	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	1	-	-	Rp. 4.500.000	Lain-lain	Telah terlaksana
Rapat koordinasi dengan Biro Persidangan I dan Biro Persidangan II terkait pelaksanaan sirkulasi kajian	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	1	-	Rp. 3.000.000	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3
Penyampaian kajian kepada AKD/K/L Terkait, dan Perguruan Tinggi mitra Badan Keahlian DPR RI melalui <i>platform data sharing</i> terintegrasi (<i>cloud</i>)	Jumlah AKD/Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi	-	-	18	-	Rp. 135.00.000	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan 3

Rencana aksi diskusi dengan pakar/mitra MoU Badan Keahlian telah dilaksanakan oleh Tim SPBE ke beberapa daerah, yaitu Yogyakarta, Kalimantan, Manado, dan Banyuwangi. Kemudian untuk rencana aksi kajian terkait hambatan pelaksanaan SPBE telah berhasil disusun dan diterbitkan melalui artikel Info Singkat yang berjudul “Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui INA Digital dan Tantangannya” dan artikel Isu Sepekan yang berjudul “Integrasi Aplikasi dan Layanan Digital Pemerintah”.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/ZMqrw6wonF52wWf>

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam tema penggunaan produk dalam negeri, Sekretariat Jenderal DPR RI memahami bahwa perlunya penggunaan anggaran belanja barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam

negeri minimal 40%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2024 adalah terealisasinya anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Indikator dari sasaran tersebut adalah penggunaan produk dalam negeri sebesar 40%.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	-	-	-	Rp. 0	Lain-lain	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40%	Persentase penggunaan produk dalam negeri	1	1	1	1	Rp. 9.000.000	Lain-lain	Telah terlaksana

Rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% telah dilaksanakan secara berkala. Realisasi transaksi belanja PDN per 3 Juni 2024 telah mencapai 87,17%.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/xoHaxoknpZtLcCb>

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB TAHUN 2024

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Evaluator Internal Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Tujuan evaluasi untuk memastikan *Roadmap* dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal RB dilakukan terhadap Evaluasi Pelaksanaan (*on-going*) dengan mempelajari dan menelaah pelaksanaan rencana aksi untuk mendapatkan informasi mengenai ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi, ketercapaian *output* kegiatan pada setiap triwulan, kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi. Dari 25 (dua puluh lima) indikator yang menjadi penilaian dalam evaluasi internal terdapat 1 (satu) indikator yaitu “Indeks Kualitas Kebijakan Publik” yang dikecualikan karena Kementerian PANRB tidak melaksanakan kegiatan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Publik di Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2023 berdasarkan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/13464/OT.05.02/11/2023 yang ditujukan kepada Kementerian PANRB dan Surat Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor B/12387/OT.05.01/10/2023 yang ditujukan kepada Deputi Bidang Kajian dan Kebijakan Inovasi LAN RI serta Surat Tanggapan IKK dari LAN RI nomor 3845/D.1/HKM.02.2. Selain itu terdapat 2 (dua) indikator yaitu “Penataan Jabatan Fungsional” dan “Pengelolaan Kinerja ASN” telah menjadi bagian dari indikator “Indeks Sistem Merit”. Dengan demikian jumlah indikator yang menjadi penilaian di Sekretariat Jenderal DPR RI adalah 22 (dua puluh dua) indikator.

Dalam pelaksanaan evaluasi internal, evaluator internal melibatkan lini kedua yaitu unit Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) sebagai unit yang berkontribusi di dalam pengelolaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI dan dalam mendapatkan informasi mengenai evaluasi *on-going*.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan melalui Surat Nomor: T/476/PI.03/06/2024 pada tanggal 20 Juni 2024, hasil evaluasi internal RB di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI adalah sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI INTERNAL ON-GOING TRIWULAN II TAHUN 2024

I. CATATAN

	PERNYATAAN	CAPAIAN
A.	Ketercapaian Target Rencana Aksi (<i>Output</i> dan Waktu)	
1.	Tingkat Impelemtnasi Penyederhanaan Birokrasi	Pelaksanaan aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Pelaksanaan aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Keseluruhan aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Belum dapat dinilai kesesuaian pelaksanaan aksi dengan waktu
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Terdapat 3 (tiga) indikator yang telah sesuai dilaksanakan pada Triwulan II, namun terdapat 2 (dua) indikator yang pelaksanaannya mundur ke Triwulan III
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Terdapat 2 (dua) indikator yang telah sesuai dilaksanakan pada Triwulan II, namun terdapat 2 (dua) indikator yang pelaksanaannya mundur ke Triwulan III
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	4 (empat) dari 10 (sepuluh) total indikator <i>output</i> aksi dilaksanakan sesuai dengan target penyelesaian pada rencana aksi yaitu di Triwulan II
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	10 (sepuluh) dari 11 (sebelas) total indikator <i>output</i> aksi dilaksanakan sesuai dengan target penyelesaian pada rencana aksi yaitu di Triwulan II
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator <i>output</i> aksi dilaksanakan sesuai dengan target penyelesaian pada rencana aksi yaitu di Triwulan II
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip	1 (satu) dari 6 (enam) total indikator <i>output</i> aksi dilaksanakan sesuai dengan target

	Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	penyelesaian pada rencana aksi yaitu di Triwulan II
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Tidak ada indikator <i>output</i> aksi dilaksanakan sesuai dengan target penyelesaian pada rencana aksi yaitu di Triwulan II
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang direncanakan (Triwulan II)
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang direncanakan (Triwulan II)
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang direncanakan (Triwulan II)
17.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlik	Pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang direncanakan (Triwulan II)
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pelaksanaan aksi telah sesuai dengan waktu yang direncanakan (Triwulan II)
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> maupun Eviden terkait rencana aksi indikator tersebut
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> maupun Eviden terkait rencana aksi indikator tersebut
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Keseluruhan kegiatan yang mendukung pelaksanaan aksi telah dilaksanakan pada Triwulan II. Namun berdasarkan laporan <i>progress</i> pelaksanaan aksi Triwulan II, disimpulkan bahwa pelaksanaan aksi terkait Arsitektur To-Be SPBE serta pelaksanaan aksi terkait <i>gap analysis</i> SPBE perlu menunggu RITIK 2025-2027 selesai, sekitar di bulan Oktober atau

		November seperti yang sudah disimpulkan pada rapat terkait Arsitektur SPBE dengan Nuvision pada tanggal 16 Mei 2024
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap reaksi "Indeks Perencanaan Pembangunan", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> maupun Eviden terkait rencana aksi indikator tersebut
B. Kualitas Kegiatan Terhadap Ekspektasi Rencana Aksi RB		
1.	Tingkat Impelemntasi Penyederhanaan Birokrasi	Dokumen rencana aksi "Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2024" belum diformalkan (ditandatangani)
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Dokumen rencana aksi "Sistem Kerja Baru 2024" belum diformalkan (ditandatangani)
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Belum dapat dinilai ketepatan pelaksanaan aksi di Triwulan II
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Terdapat 1 (satu) indikator yang telah sesuai tepat dalam pelaksanaan komponen aksi. Namun masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaan aksi
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Terdapat 1 (satu) indikator yang telah sesuai tepat dalam pelaksanaan komponen aksi. Namun masih terdapat 3 (tiga) indikator yang belum sesuai dalam pelaksanaan aksi
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Seluruh indikator di Triwulan II telah sesuai pelaksanaan komponen aksi pada Triwulan II
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	6 (enam) dari 10 (sepuluh) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah

		tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	1 (satu) dari 6 (enam) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	1 (satu) dari 6 (enam) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	4 (empat) dari 5 (lima) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	2 (dua) dari 3 (tiga) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	2 (dua) dari 3 (tiga) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
17.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlik	3 (tiga) dari 4 (empat) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah terdapat eviden dan dinilai telah tepat menjawab pelaksanaan komponen aksinya
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya

	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat", belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> indikator tersebut
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> terkait rencana aksi indikator tersebut
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Eviden terkait setiap indikator telah menggambarkan pelaksanaan aksi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Indeks Perencanaan Pembangunan", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> terkait rencana aksi indikator tersebut
C. Kualitas Manajemen Dalam Pelaksanaan RB		
1.	Tingkat Implemtasi Penyederhanaan Birokrasi	Tidak terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Belum seluruh indikator aksi berkualitas, terdapat 3 (tiga) indikator yang belum menggambarkan pelaksanaan anggaran dan penggunaan anggaran. Serta telah terdapat 2 (dua) indikator yang telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
4.	Pelaksanaan Akuntabilitas Sistem Kinerja	Belum dapat dinilai kualitas pelaksanaan aksi di Triwulan II

	Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Terdapat 1 (satu) indikator yang telah sesuai berkualitas. Namun terdapat 4 (empat) indikator yang belum diberikan penjelasan dan menggambarkan penggunaan anggaran dalam kegiatannya
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	Terdapat 2 (dua) indikator yang telah sesuai berkualitas. Namun terdapat 2 (dua) indikator yang belum diberikan penjelasan dan menggambarkan penggunaan anggaran dalam kegiatannya
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Belum menggambarkan pelaksanaan kegiatan "publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI" (contoh yang dilampirkan hanya 1 (satu) media sosial) dan belum tergambarlah penggunaan anggaran pada kegiatan "tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit terkait dengan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat" pada laporan progress Triwulan II. Sehingga belum tergambar kualitas pelaksanaan aksinya
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Pelaksanaan kegiatan 5 (lima) dari 10 (sepuluh) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Pelaksanaan kegiatan 1 (satu) dari 6 (enam) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Pelaksanaan kegiatan 1 (satu) dari 6 (enam) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi

13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan II
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Pelaksanaan kegiatan 4 (empat) dari 5 (lima) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Pelaksanaan kegiatan 2 (dua) dari 3 (tiga) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	Pelaksanaan kegiatan 2 (dua) dari 3 (tiga) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
17.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhlik	Pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) dari 4 (empat) total indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan II telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat", belum dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> terkait rencana aksi indicator tersebut
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik", dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> terkait rencana aksi indikator tersebut
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Eviden yang dilampirkan telah menggambarkan manajemen/pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan aksi secara substansial telah sesuai untuk mencapai <i>output</i> yang ditetapkan dalam rencana aksi
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Analisis terhadap aksi pada Triwulan II terhadap rencana aksi "Indeks Perencanaan Pembangunan", belum

		dapat dilaksanakan karena belum dilampirkannya Laporan Progress Ketercapaian <i>Output</i> terkait rencana aksi indikator tersebut
--	--	--

II. REKOMENDASI

Berdasarkan atas catatan pelaksanaan Rencana Aksi RB Sekretariat Jenderal DPR RI tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Rincian penjelasan atas rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	AKSI	REKOMENDASI
1.	Tingkat Impelemntasi Penyederhanaan Birokrasi	Agar dapat memformalkan Rencana Aksi "Implementasi Penyederhanaan Birokrasi 2024"
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Agar dapat memformalkan Rencana Aksi "Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN" tahun 2024
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Agar pada Laporan Progress "Indeks SPBE" dapat memberikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator dan memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran yang dilakukan untuk mencapai <i>output</i> kegiatannya
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi: Nilai SAKIP	Agar dapat menyusun dan melampirkan laporan <i>progress</i> "Nilai SAKIP" Triwulan II secara tepat waktu
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pada Laporan Progress dapat memberikan penjelasan untuk indikator yang mundur pelaksanaannya dan yang menggunakan anggaran; 2. Agar dapat memformalkan (ditandatangani) seluruh eviden yang dilampirkan; 3. Agar dapat mengupdate seluruh eviden sehingga dapat diketahui nilai dari tiap – tiap eviden
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Masturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar pada Laporan Progress dapat memberikan penjelasan untuk indikator yang mundur pelaksanaanya dan yang menggunakan anggaran;

		<p>2. Agar dapat memformalkan (ditandatangani) seluruh eviden yang dilampirkan;</p> <p>3. Agar dapat mengupdate seluruh eviden agar dapat diketahui nilai dari tiap – tiap eviden</p>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Agar dapat memberikan penjelasan dan melampirkan <i>link</i> beberapa eviden terkait aksi "Publikasi media sosial dan mekanisme pengaduan DPR RI", serta memberikan penjelasan dalam penggunaan anggaran pada kegiatan" tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit terkait dengan Tim Kerja Integrasi Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat" di Laporan Progress Tingkat Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) Triwulan II
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>1. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi;</p> <p>2. Agar memperhatikan target penyelesaian dalam merealisasikan rencana aksi;</p> <p>3. Agar menandatangani daftar hadir kegiatan sosialisasi gratifikasi</p>
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum	Agar memperhatikan target penyelesaian dalam merealisasikan rencana aksi
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan	-
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	<p>1. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi;</p> <p>2. Agar memperhatikan target penyelesaian dalam merealisasikan rencana aksi</p>
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Agar dapat melampirkan eviden indikator <i>output</i> aksi "Jumlah laporan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK LKPP" secara tepat waktu

15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Agar dapat melampirkan eviden Indikator <i>output</i> aksi "Rekonsiliasi Eksternal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai" secara tepat waktu
16.	Penguatan Sistem Merit: Indeks Sistem Merit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II; 2. Agar melampirkan eviden Indikator "Laporan pelaksanaan pelatihan per triwulan" tepat waktu
17.	Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhhlak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar dapat memformalkan Rencana Aksi "Pelaksanaan Core Values ASN: Indeks BerAkhhlak"; 2. Agar dapat melampirkan eviden indikator <i>output</i> aksi "Sosialisasi Pedoman Panduan Core Value BerAKHLAK di Portal DPR" secara tepat waktu
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan eviden untuk setiap indikator <i>output</i> aksi secara tepat waktu
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan eviden untuk setiap indikator <i>output</i> aksi secara tepat waktu
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Agar untuk periode-periode berikutnya menjabarkan atau menyampaikan bukti dukung terkait tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mempersiapkan/ <i>drafting</i> penyusunan Arsitek To-Be SPBE dan penyusunan <i>gap analysis</i> sembari menunggu RITIK 2025-2027 selesai
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Agar dapat melampirkan laporan <i>progress</i> ketercapaian <i>output</i> Triwulan II dan eviden untuk setiap indikator <i>output</i> aksi secara tepat waktu